



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.kip.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News
 Banten Raya Post (lainnya)

Hari/Tanggal : Rabu 1 Juli 2015 Halaman Koran : 827

PPID Dinilai Belum Berfungsi

SERANG - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sejumlah SKPD di Banten dinilai masih be-

lum maksimal menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Informasi

(KI) Banten, di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa (30/6). Acara yang mengangkat tema 'Peran Media dalam Mendorong Keterbu-

● Baca PPID Hal 7



MARJUKI/BANTEN RAYA

Suasana FGD KI Banten di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa (30/6).

PPID Dinilai Belum Berfungsi

● Sambungan dari Hal 8

kaan Informasi bagi Badan Publik di Banten, ini menghadirkan pemateri Dekan Fakultas Fisip Unsera, Abdul Malik dan Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten Ade Jahran. Hadir juga seluruh komisioner KI Banten.

Teguh Mahardika, salah satu peserta FGD mengungkapkan bahwa banyaknya gugatan di KI Banten menunjukkan belum jalannya peran PPID dalam memberikan informasi kepada pemohon. "Banyaknya gugatan ajudikasi yang mencapai 200 permoho-

nan itu hanya hilirnya saja, hulunya? (Bayaknya gugatan menunjukkan) SKPD belum terbuka," kata salah satu wartawan nasional ini.

Teguh menyatakan, beberapa SKPD di Pemprov Banten memang sudah menunjuk PPID. Namun, lanjutnya, PPID itu belum berjalan sesuai harapan.

Peserta lain, Aditya Ramadhan mengungkapkan, SKPD di Pemprov Banten memang sebagian sudah memiliki *website* sebagai media informasi masing-masing SKPD yang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi, katanya, *website* tersebut berisi kegiatan-kegiatan

SKPD yang terbaru.

Sementara Abdul Malik mengkritisi keberadaan KI Banten yang belum begitu dikenal di masyarakat. KI Banten yang sudah berjalan dua periode kepengurusan saat ini masih berkutat dengan sidang-sidang gugatan dari ratusan permohonan yang sebagian besar diajukan LSM yang sama. "Jangan sampai KI Banten jenuh karena yang mengajukan permohonan LSM itu-itu saja," ungkapnya.

Abdul Malik juga berharap agar KI Banten bisa menyosialisasikan diri sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaannya.

"KI jangan hanya dijadikan alat oleh pihak tertentu atau LSM hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum," katanya.

Pemprov Banten yang memperoleh disclaimer dalam pengelolaan keuangan, kata Abdul Malik, menunjukkan bahwa Pemprov Banten belum terbuka.

Menanggapi hal itu, Ade Jahran menyatakan, banyaknya gugatan informasi publik di lembaganya karena pihaknya tidak bisa menolak. Langkah yang akan dilakukan, pihaknya menolak LSM yang tak punya SK penetapan dari Kemenkum HAM (**marjuki**)